



Provinsi Tetap Anggarkan Rp 1,2 T

■ Akibat Belum Turunnya PP dari UU 23 Tahun 2014

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pemprov Bali tetap menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk 2017. Hal ini terkait penundaan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bali, Putu Astawa mengatakan, karena masih *judicial review* UU 23 Tahun 2014 terkait aturan pelimpahan wewenang ke provinsi, maka akan mengacu Permen- dagri No 31 Tahun 2016 tentang penganggaran APBD 2017.

Dimana semua kewenangan penganggaran yang hendak dilimpahkan ke pemerintah provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014 akan dikembali ke pemerintah kabupaten/kota.

Walaupun begitu pemerintah Provinsi Bali sudah siap



TRIBUN BALI/AA GEDE PUTU WAHYURA

PUTU ASTAWA

terkait peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari beberapa hal yang akan dilimpahkan ke pemerintah Provinsi Bali.

Untuk pos pada anggaran pendidikan pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan amanat UU akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD Provinsi Bali. Di tahun 2016 anggaran pendidikan Provinsi Bali Rp

1.100.374 Triliun (20,19%). Untuk tahun 2017 anggaran masih berkisar diangka Rp 1,1 sampai Rp 1,2 Triliun.

"Kalau 2017 karena kewenangan pemerintah Provinsi cuma SLB saja. 20 persen itu kembali kita membantu sarana dan prasarana sekolah di SD, SMP, SMA. Untuk 2017 juga sekitar Rp 1,2 Triliun termasuk gaji dan BOS. Untuk di Disdik saja Rp 800 miliar termasuk pegawai," ujarnya.

Dijelaskannya juga perbedaan dari kewenangan SMA/SMK ke pemerintah provinsi hanya akan membengkak di anggaran gaji pegawai. Karena selama ini pemerintah provinsi Bali sudah mengucurkan dana untuk fungsi pendidikan kepada sekolah di Bali. (agw)

Edisi : Sabtu, 16 Juli 2016

Hal : 5